

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orde Baru merupakan istilah untuk menyebut masa kepemimpinan Presiden Soeharto sejak tahun 1965 hingga 1998. Masa ini bercirikan kuat, terpusat, dan pembangunan negara.¹

Seperti yang ketahui, pemerintahan Orde Lama menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin sebagai sistem pemerintahan negara. Setelah Orde Lama runtuh (lengser) dan berganti Orde Baru, maka otomatis sistem pemerintahan pun turut berubah. Orde Baru tidak lagi menerapkan Demokrasi Terpimpin, tetapi Demokrasi Pancasila.²

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menata kembali perpolitikan di tanah air, mengakibatkan munculnya konflik-konflik. Konflik-konflik tersebut umumnya terjadi antara pemerintah dengan rakyat. Salah satu konflik pada pemerintahan tersebut adalah konflik 27 Juli 1996 atau yang disebut Peristiwa Kuda Tilu, pada tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). PDI Perjuangan adalah salah satu partai dari 48 partai yang ikut dalam pemilu 1999. Awal PDI Perjuangan tidak bisa dipisahkan dari Partai Demokrat Indonesia yang mempunyai *platform* Nasionalisme.³

¹ Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia*, (Yogyakarta : Diva Press, 2014), Hal. 402.

² Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap...*, Hal. 406

³ Megandru W. Kawuryan, *Kamus Politik Modern*, (Yogyakarta : Pura Pustaka, 2008), Hal.562.

Rezim orde baru, untuk mencegah PDI Megawati menjadi tantangan serius, rezim melakukan intervensi dengan kekerasan, dan akhirnya malah meningkatkan popularitas partai tersebut. Pada bulan Juni 1996, ABRI berhasil memanipulasi kongres luar biasa PDI, sehingga mampu menurunkan Megawati dari posisi ketua dan memilih kembali Soerjadi, yang baru sebelumnya tidak dipercaya Soeharto tapi sekarang tidak begitu mengancam dibandingkan Megawati. Tetapi, Megawati dan pendukungnya menolak mengakui hasil kongres ini dan melancarkan tuntutan hukum terhadap campur tangan pemerintah. Megawati juga tetap berkedudukan di kantor pusat PDI di Jakarta. Di kantor pusat ini, penolakan terhadap rezim menarik banyak perhatian, dan ada banyak pidato umum di sana. Para aktivis pro-demokrasi, LSM, dan kaum miskin urban yang marah berdemonstrasi mendukung perjuangan Megawati.⁴

Peristiwa 27 Juli 1996, peristiwa ini berawal dari kemenangan Megawati Sukarnoputri pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (KLB PDI) di Surabaya pada 1993. Kemenangan Megawati adalah acaman rezim Orde Baru. Maka, dilakukan rekayasa politik untuk kembali menahtakan Soerjadi sebagai ketua PDI, yang kemudian ditindak lanjuti dengan aksi pengambilalihan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro pada 27 Juli 1996.

Penyerbuan yang dilakukan oleh militer, sejumlah preman, dan aparat kepolisian menyebabkan 5 orang tewas, 149 luka-luka, 23 orang dinyatakan hilang. Peristiwa ini berlanjut dengan diburu dan ditangkapnya aktivis PDI sarta

⁴ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2008), hal. 684-685.

PRD (Partai Demokrasi Rakyat) yang dianggap telah melecehkan presiden. Sehingga, mereka dituntut dengan undang-undang anti-subversif. Motif politik dalam kasus ini sangat jelas. Bahkan, dalam pengakuan ketua PDI, Soerjadi, dikatakan bahwa penyerbuan dilakukan oleh Brimob dan TNI yang berpakaian PDI.⁵

Sebagai salah satu peristiwa yang relatif besar, tentu saja diulas dan diberitakan oleh media massa baik berupa media cetak maupun media elektronik pada masanya. Alasannya sebagai bahan berita yang bersifat aktual dan kepentingannya untuk di informasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam pemberitaan diberbagai media tersebut terdapat macam-macam jenis tipografi, *lay out*, dan bahasa yang digunakan secara berbeda tergantung oleh pemberitaan media masing-masing dan sesuai dengan standar pemberitaan. Oleh karena itu, kesan dari setiap pemberitaan tersebut masing-masing akan berbeda satu sama lain.

Rezim Orde Baru telah mengingkari kebebasan pers yang sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia pasal 28 yang menyatakan “*kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”. Hal yang demikian menjadi bukti bahwa pemerintah melawan hukum dengan banyaknya terjadi pembredelan beberapa media massa yang mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diterapkannya.⁶

⁵ Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap...*, hal. 435-436.

⁶ I Eko Nurul Akbar, No. 3 Oktober 2015, Surabaya *Pemberitaan Koran Tentang 27 Juli 1996 (Kompas dan Surat Karya)*, Hal 372.

Mengenai pemberitaan tentang Peristiwa 27 Juli 1996 tulisan setiap media pasti berbeda-beda, hal tersebut dipengaruhi oleh karakteristik dan afiliasi media terhadap kelompok kepentingan tertentu, sehingga satu sama lain saling melakukan pemberitaan sesuai dengan *interest* pers itu sendiri, baik pada peristiwa nya atau pada orang dan kelompok yang terlibat dalam peristiwa itu. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya berita tidak lepas dari unsur ideologi dan kepentingan masing-masing kelompok. Karena media cetak pada saat tersebut banyak dimiliki oleh berbagai golongan, tokoh, dan organisasi.⁷

Ada dua situasi yang membentuk pers pada saat itu, situasi tersebut berpengaruh terhadap karakter pers Orde Baru saat itu. Pertama secara politik, situasi tersebut dijalankan oleh pemerintah agar memperketat control pemerintah terhadap pers dengan membuat peraturan pemerintah lewat undang-undang pokok pers No.21/1982 yang menganut prinsip pencekalan atau *pre communication penalty*, sehingga pemberitaan menjadi terukur dan disesuaikan dengan keinginan pemerintah yang memperkuat undang-undang sebelumnya No. 11/1966, No.4/1967, terutama setelah protes yang dilakukan oleh mahasiswa pada tahun 1977-1978.⁸

Pada saat zaman orde baru, tahun 1974 ada beberapa media cetak yang dibredel, Surat Ijin Terbit, dan Surat Ijin Cetak nya di cabut. Daftar Koran-koran di Jakarta yang di cabut SIT (Surat Ijin Terbit) nya adalah Indonesia Raya, Harian Kami, Majalah Putera Indonesia di Bandung. Sedangkan surat kabar yang di cabut

⁷ Tholib Rohmatillah, *Politik Media : Studi Kasus Peristiwa Tanjung Priok 1984*, Skripsi, 19 Oktober 2006, Hal.4.

⁸ Tholib Rohmatillah, *Politik Media : Studi Kasus...*, Hal. 5.

SIC (Surat Ijin Cetak) nya adalah harian pedoman dan minggu Ekspres, serta di Surabaya sejak tanggal 19 Januari 1974 dilarang terbit Koran Suluh Berita.

Kedua, yaitu secara ekonomi, selain dari tingkat represi pemerintah yang besar diatas rupanya, berkembang pesat nya pembangunan dibidang ekonomi membawa imbas pada dunia industri termasuk juga terhadap industri penerbitan. “*Oplahisme*” lahir sebagai tuntutan atas situasi ini yang berarti pula merubah orientasi penerbitan pers di Indonesia. Pola-pola berita yang berupa *Gathering News*⁹ yang digunakan oleh beberapa penerbitan terutama jenis ini adalah berita yang bersifat politis dan keras kemudian banyak diganti dengan melakukan pola *Making News*¹⁰, kemudian materi yang di suguhkan pun mulai bergeser ke berita-berita yang berbentuk *feature* ketimbang *Straight News*.

Tampak nya, tidak dapat dipungkiri pengaruh kedua tekanan ini terhadap karakter pers yang cenderung lemah karena dominan nya kekuasaan komunikasi pemerintah dan bisnis oriented perusahaan penerbitan. Sehingga menjadikan mereka tidak mau mengambil resiko dalam pemberitaan yang bertentangan dengan pemerintah agar terbebas dari pembredelan dan dicabutnya Surat Ijin Usaha Penerbitan (SIUP). Kondisi dilematis ini akan tampak dalam *performance pers*, terutama yang menyangkut pemberitaan politik yang cukup beresiko besar terhadap eksistensi nya, maka sebagian besar mengambil jalan aman dengan banyak

⁹ Tholib Rohmatillah, *Politik Media : Studi Kasus...*, Hal.5. *Gathering News* disebut pula *News Getting* adalah jenis berita yang menggunakan *Hard Fact* atau fakta keras yang berarti cerita tersebut lugas atau langsung.

¹⁰ Tholib Rohmatillah, *Politik Media : Studi Kasus...*, Hal. 5.

mengadopsi gaya *Making News* yang berarti mengurangi jumlah berita yang bersifat keras.¹¹

Hal tersebut berlaku dalam pemberitaan Peristiwa 27 Juli 1996. Maka berdasarkan jenis media yang ada pada pers era Orde Baru, dari sekian banyak jumlah surat kabar yang ada maka dipilihlah tiga media cetak untuk mewakili kelompok yang terlibat dalam peristiwa itu. Pertama Koran Kompas, kedua Koran Pikiran Rakyat, dan ketiga Koran Republika.

Harian Kompas sejak puluhan tahun adalah harian nasional dengan tiras tertinggi di Indonesia. Kompas diterbitkan oleh Kelompok Kompas Gramedia (KKG), yang selain Grup Jawa Pos merupakan perusahaan media terbesar di Indonesia. Kompas didirikan pada tahun 1965. Harian ini selama masa kekuasaan diktatur patuh pada pemerintah dan dianggap sebagai “New Order newspaper par excellence”.

Jakob Oetama sebagai pendiri harian Kompas sampai sekarang adalah pemilik saham terbesar dan memegang jabatan sebagai direktur KKG. Ia memiliki kedudukan dalam Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS). Kemampuan jurnalistik dan bisnisnya membawanya menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi sekaligus direktur perusahaan sampai tahun 2000. Haluan konservatif dari harian ini menjadi makin kental karenanya. Jakob Oetama mempunyai latar belakang jurnalistik dan konsep diri seperti itu. Ia menginginkan penyampaian pendidikan dan nilai-nilai melalui tulisan-tulisan di hariannya. Walaupun begitu, sekarang ia memberi pengaruh yang lebih sedikit kepada redaksi dalam penentuan berita dibandingkan

¹¹ Tholib Rohmatillah, *Politik Media : Studi Kasus...*, Hal. 5.

dulu. Sebagai pemilik, ia ikut menentukan pemimpin redaksi dan kepala rubrik tajuk rencana dan juga penempatan kepala desk yang lain.¹²

Harian Pikiran Rakyat, membahas sejarah kelahiran dan pertumbuhan surat kabar Pikiran Rakyat di Bandung akan menemukan fenomena menarik karena dua hal. Pertama, surat kabar Pikiran Rakyat yang pertama kali terbit pada tanggal 30 Mei 1950 di Bandung ternyata berbeda dengan surat kabar yang sekarang dikenal dan mulai terbit tanggal 24 Maret 1966. Kedua, karena perbedaan yang pertama itu maka berbeda pula visi dan jati diri dari surat kabar Pikiran Rakyat di Bandung itu pada periode 1951-1965 dan 1966-sekarang.¹³

Harian Republika adalah satu-satunya surat kabar yang bernafaskan Islam, yang bertahan hidup di antara sederetan koran Islam yang terbit tahun 1990-an, sejalan dengan kebangkitan golongan Islam menengah saat itu. Harian ini diterbitkan pada tahun 1993 oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), yang saat itu memiliki 51% sahamnya. Berdirinya Republika sebagai corong kepentingan kaum Islam mencerminkan perkembangan politik masa itu. Presiden Suharto mencoba untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya yang melemah dengan mendekati golongan elit Islam. Yang paling jelas adalah tampilnya sosok B.J. Habibie, yang menandai bangkitnya politisi Islam yang sampai tahun 1980-an disingkirkan oleh Suharto. Insinyur ahli pesawat lulusan Jerman ini mula-mula

¹² Anett Keller, *Tantangan Dari Dalam Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional : Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika*, (Jakarta : Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia Office, 2009) Hal. 45-46

¹³ Ramadhan Budi Prastowo, *Muncul dan Berkembangnya Surat Kabar Pikiran Rakyat Pada Awal Orde Baru Di Bandung (1950-1974)*, *Skripsi*, (Yogyakarta : e-Journal, 2017), Hal. 39-40.

menjadi Menteri Riset dan Teknologi dan lalu menjadi Wakil Presiden, sebelum ia pada Mei 1998 menggantikan Suharto sebagai Presiden.¹⁴

Dari uraian diatas tergambaran mengenai peran dan posisi pers yang berpengaruh bagi pembentukan citra terhadap pembacanya, terutama dalam pemutan berita politis, maka penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk skripsi tentang pemberitaan media massa terhadap Peristiwa 27 Juli 1996 dengan judul Peristiwa 27 Juli 1996 (Kuda Tilu) Dalam Pemberitaan Media Cetak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang proses terjadinya Peristiwa 27 Juli 1996 dan kondisi sosial-politik bangsa Indonesia pada tahun 1990-1996?
2. Bagaimana perbandingan media cetak : Koran Kompas, Koran Pikiran Rakyat, dan Koran Republika memberitakan peristiwa 27 Juli 1996?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang proses terjadinya Peristiwa 27 Juli 1996 dan kondisi sosial-politik bangsa Indonesia pada tahun 1990-1996.

¹⁴ Anett Keller, *Tantangan Dari Dalam...*, Hal. 82-83

2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan media cetak : Koran Kompas, Koran Pikiran Rakyat, dan Koran Republika memberitakan peristiwa 27 Juli 1996 tersebut.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peristiwa 27 Juli 1996 secara umum sudah ada yang meneliti yaitu mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul *Peristiwa 27 Juli 1996 : Konflik dalam Partai Demokrasi Indonesia antara Kubu Megawati dengan Kubu Soerjadi* oleh Rahmat, Aam Amaliah (2013), dan ada beberapa buku yang membahas tentang peristiwa ini. Tetapi, judul yang penulis teliti **“PERISTIWA 27 JULI 1996 DALAM PEMBERITAAN MEDIA CETAK (KOMPAS, PIKIRAN RAKYAT, DAN REPUBLIKA)”** belum pernah ada yang mengkaji nya.

1. Ajidarma, Gibran (1997), *Peristiwa 27 Juli* (Jakarta : Aliansi Jurnalistik Independen Institut Studi Arus Informasi). Buku ini menjelaskan tentang peristiwa secara keseluruhan, dari latar belakang, kronologi, sampai pihak-pihak yang menunggangi peristiwa 27 Juli 1996. Metode yang digunakan dengan cara memberikan pemaparan melalui laporan utama sebuah majalah yang dilakukan oleh beliau. Persamaan buku ini dengan buku yang lain adalah didalam nya sama-sama membahas tentang peristiwa 27 Juli 1996.
2. Peter Kasenda (2018), *Peristiwa 27 Juli 1996 : Titik Balik Pelawanan Rakyat* (Yogyakarta : Media Pressindo). Buku ini menjelaskan melawan rezim Soeharto, keadaan politik pada Orde Baru, peristiwa sabtu kelabu, titik balik

pelawanan rakyat, sampai pada peristiwa 1998. Metode yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah dengan cara menganalisis satu persatu pokok pembahasannya.

3. Rahmat, Aam Amaliah (2013), *Peristiwa 27 Juli 1996 : Konflik dalam Partai Demokrasi Indonesia antara Kubu Megawati dengan Kubu Soerjadi*. Other thesis. Masalah utama yang dibahas dalam skripsi ini adalah “Bagaimana Konflik dalam Partai Demokrasi Indonesia menyebabkan terjadinya peristiwa 27 Juli 1996.
4. Retor A.W Kaligis (2014), *Marhaen dan Wong cilik : membedah wacana dan Praktik Nasionalisme bagi Rakyat Kecil dari PNI sampai PDI Perjuangan* (Tangerang Selatan : CV Marjin Kiri). Buku ini ditulis oleh Retor A.W Kaligis. Berbeda dengan buku lainnya, buku ini menjelaskan awal terbentuknya Partai Demokrasi Indonesia, yang awalnya terdiri dari lima partai, terus mengalami Fusi yang pada akhirnya terbentuklah PDI, juga menjelaskan Kongres-kongres yang dilalui PDI, konflik-konflik yang muncul di internal dan eksternal PDI, dan sampai menjelaskan tentang Peristiwa 27 Juli 1996, kerusuhan yang dialami PDI, sampai menjadi PDI-Perjuangan.

Walaupun adanya kekurangan di dalam sumber-sumber di atas, sumber-sumber tersebut tetap menjadi rujukan bagi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Perbedaan kajian dengan judul penulis yaitu, Peristiwa 27 Juli 1996 Dalam Pemberitaan Media Cetak (Kompas, Pikiran Rakyat, dan Republika), penulis berfokus pada perbedaan penulisan berita dari ketiga media cetak tersebut dalam memberitakan peristiwa 27 Juli 1996. Selain itu, penulis juga melihat

kepentingan yang muncul dalam memberitakan peristiwa dari keriga media cetak tersebut.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Louis Gottchalk dalam bukunya *mengerti sejarah* dikatakan bahwa metode penelitian sejarah merupakan proses pengujian dan analisis kesaksian sejarah untuk menemukan data yang otentik yang dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi sebuah kisah yang dapat dipercaya.¹⁵

1. Tahapan Heuristik

Tahapan Heuristik adalah tahapan pertama didalam metode penelitian sejarah. Tahapan Heuristik ini adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer berupa (Koran Kompas, Koran Pikiran Rakyat, dan Koran Republika) terkait peristiwa 27 Juli 1996 diperoleh penulis di Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDA JABAR), Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta Bandung.

a. Sumber Primer

a. Sumber Tertulis

1. Ajidarma, Gibran. *Peristiwa 27 Juli*. (Jakarta : Aliansi Jurnalistik Independen Institut Studi Arus Informasi. 1997. Cetakan Kedua)

¹⁵ Louis Gottchalk. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto , judul asli: *Understanding History: A Primer History Method*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1983). Hal. 32.

b. Koran

1. Kompas, *Presiden Minta Penjelasa Enam Pejabat Tinggi*. Edisi 30 Juli 1996. Sumber tersebut didapatkan oleh penulis hari Kamis, 11 April 2019, di Perpustakaan Nasional Salemba Raya, Jakarta Pusat.
2. Kompas, *Gubernur DKI Jakarta: Warga Ibu Kota Diminta Waspada dan Menahan Diri*. Edisi 30 Juli 1996. Sumber tersebut didapatkan oleh penulis hari Kamis, 11 April 2019, di Perpustakaan Nasional Salemba Raya, Jakarta Pusat.
3. Kompas, *MUI Kecam Kerusakan 27 Juli 1996*. Edisi 31 Juli 1996. Sumber tersebut didapatkan oleh penulis hari Kamis, 11 April 2019, di Perpustakaan Nasional Salemba Raya, Jakarta Pusat.
4. Kompas, *Pembuat Kerusakan 27 Juli Sebaiknya Dijerat KUHP*. Edisi 31 Juli 1996. Sumber tersebut didapatkan oleh penulis hari Kamis, 11 April 2019, di Perpustakaan Nasional Salemba Raya, Jakarta Pusat.
5. Kompas, *Pemerintah akan Tindak Pelaku Kerusakan 27 Juli*. Edisi 31 Juli 1996. Sumber tersebut didapatkan oleh penulis hari Kamis, 11 April 2019, di Perpustakaan Nasional Salemba Raya, Jakarta Pusat.
6. *Pikiran Rakyat, Pangab : Kerusakan PDI Ditunggangi Oknum Tak Bertanggungjawab : Lebih 200 Perusuh Ditahan*. Edisi 29 Juli 1996. Sumber tersebut didapatkan oleh penulis pada hari Senin, 30 April 2018, di DISPUSIPDA JABAR.

7. Pikiran Rakyat, *Rusuh di Jakarta Tak Pengaruhi Jawa Barat*. Edisi 29 Juli 1996. Sumber tersebut didapatkan oleh penulis pada hari Senin, 30 April 2018, di DISPUSIPDA JABAR.
8. Rakyat, *Presiden “ Aparat Jangan Ragu Tindak Perusuh : Kerusuhan Ditunggangi PRD*. Edisi 30 Juli 1996. Sumber tersebut didapatkan oleh penulis pada hari Senin, 30 April 2018, di DISPUSIPDA JABAR.
9. Pikiran Rakyat, *Majelis Ulama dan Oras Islam Kecam Kerusuhan*. Edisi 30 Juli 1996. Sumber tersebut didapatkan oleh penulis pada hari Senin, 30 April 2018, di DISPUSIPDA JABAR.
10. Pikiran Rakyat, *Mekno Polkam Soesilo Soedarman : Tidak Benar, Orba Gagal Memberatas Komunisme*. Edisi 31 Juli 1996. Sumber tersebut didapatkan oleh penulis pada hari Senin, 30 April 2018, di DISPUSIPDA JABAR.
11. Pikiran Rakyat, *Pangdam Jaya : Tembak Ditempat Bagi Perusuh*. Edisi 31 Juli 1996. Sumber tersebut didapatkan oleh penulis pada hari Senin, 30 April 2018, di DISPUSIPDA JABAR.
12. Pikiran Rakyat, *Konflik Internal PDI dDalam Kajian HIstori*. Edisi 31 Juli 1996. Sumber tersebut didapatkan oleh penulis pada hari Senin, 30 April 2018, di DISPUSIPDA JABAR.
13. Republika, *Suasan Jakarta Kembali Pulih*. Edisi 29 Juli 1996. Sumber tersebut didapatkan oleh penulis hari Kamis, 11 April 2019, di Perpustakaan Nasional Salemba Raya, Jakarta Pusat.

14. Republika, *Pangab: Tindak Tegas Pengganggu Ketentraman Umum*. Edisi 29 Juli 1996. Sumber tersebut didapatkan oleh penulis hari Kamis, 11 April 2019, di Perpustakaan Nasional Salemba Raya, Jakarta Pusat.
15. Republika, *PPP dan PDI Serukan Warganya tak Terpengaruh Provokasi*. Edisi 29 Juli 1996. Sumber tersebut didapatkan oleh penulis hari Kamis, 11 April 2019, di Perpustakaan Nasional Salemba Raya, Jakarta Pusat.
16. Republika, *Soerjadi: Tak Ada yang Istimewa, Megawati: Soerjadi Bertanggung Jawab*. Edisi 29 Juli 1996. Sumber tersebut didapatkan oleh penulis hari Kamis, 11 April 2019, di Perpustakaan Nasional Salemba Raya, Jakarta Pusat.
17. Republika, *Kembali Tenang*. Edisi 29 Juli 1996. Sumber tersebut didapatkan oleh penulis hari Kamis, 11 April 2019, di Perpustakaan Nasional Salemba Raya, Jakarta Pusat.
18. Republika, *Setelah Kasus PDI*. Edisi 29 Juli 1996. Sumber tersebut didapatkan oleh penulis hari Kamis, 11 April 2019, di Perpustakaan Nasional Salemba Raya, Jakarta Pusat.
19. Republika, *Konflik PDI, Pelaku Pemilu, dan Golput*. Edisi 29 Juli 1996. Sumber tersebut didapatkan oleh penulis hari Kamis, 11 April 2019, di Perpustakaan Nasional Salemba Raya, Jakarta Pusat.
20. Republika, *MUI Serukan Umat Islam Tetap Tenang*. Edisi 30 Juli 1996. Sumber tersebut didapatkan oleh penulis hari Kamis, 11 April 2019, di Perpustakaan Nasional Salemba Raya, Jakarta Pusat.

21. Republika, Presiden Panggil Enam Pejabat Tinggi. Edisi 30 Juli 1996.
Sumber tersebut didapatkan oleh penulis hari Kamis, 11 April 2019, di
Perpustakaan Nasional Salemba Raya, Jakarta Pusat.

c. Sumber Sekunder

a. Skripsi

1. Tholib Rohmatillah, 2006, "*Politik Media : Studi Kasus Peristiwa Tanjung Priok 1984*", Skripsi, 19 Oktober 2006.
2. Aini Almutaallimah, 2018, *Politik Media : Analisis Perbandingan Pemberitaan Koran, Kompas, Suara Karya, dan Berita Yudha dalam Peristiwa 15 Januari 1974*, Skripsi, 18 Desember 2018.

b. Buku

1. Peter Kasenda, 2018, *Peristiwa 27 Juli 1996 : Titik Balik Perlawanan Rakyat*, (Yogyakarta : Media Pressindo)
2. Retor A.W. Kaligis, 2014, *Marhaen dan Wong Cilik : Membedah Wacana dan Praktik Nasionalisme Bagi Rakyat Kecil dari PNI sampai PDI-Perjuangan*, (Tangerang Selatan : CV. Marjin Kiri).

2. Tahapan Kritik

Setelah melakukan tahap pertama yaitu tahap pengumpulan data-data lewat tahapan *heuristik*, tahapan selanjutnya yaitu *kritik*. Tahapan ini merupakan tahap mengkritisi sumber yang sudah didapatkan. Dalam tahapan ini yang dilakukan penulis adalah menentukan kredibilitas dan ontentitas sebuah sumber baik itu naskah atau dokumen yang nantinya akan ditentukan tingkat validitasnya dilihat dari teks

dan nilai-nilai isi. Pada tahapan ini juga penulis menyeleksi atau menyaring beberapa sumber-sumber sejarah agar dapat digunakan sebagai sumber rujukan dalam penulisan Praktek Profesi Lapangan. Tahapan kritik ini dibagi menjadi dua yaitu kritik intern dan ekstern.

a. Kritik Ekstern

Verifikasi pada penelitian sejarah identik dengan kritik sumber, yaitu kritik ekstern yang mencari otensitas atau keotentikan (keaslian) sumber.¹⁶ Ciri-ciri kritik ekstern adalah 1.)apakah sumber tersebut dikehendaki atau tidak? 2.) apakah sumber tersebut asli atau turunan? 3.) apakah sumber tersebut utuh atau tidak?

Misalnya pada Koran Pikiran Rakyat, *Rusuh di Jakarta Tak Pengaruhi Jawa Barat*. Edisi 29 Juli 1996. Sumber Koran Kompas dikehendaki, serta kondisi Koran tersebut masih baik, namun dipinggir-pinggir Koran tersebut sudah rapuh dan mulai dimakan rayap. Hal ini disebabkan karena Koran tersebut sudah lama usianya 22 tahun. Tintanya masih jelas dan tidak luntur. Sumber tersebut asli, karena didapatkan langsung oleh penulis di Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDA JABAR). Sumber tersebut masih utuh, hanya saja di pinggir-pinggirnya sedikit lapuk. Warna kertasnya sudah kekuning-kuningan sebab sudah lama.

Judul buku milik pribadi yang penulis peroleh dengan membeli buku di online shop, antara lain sebagai berikut :

¹⁶ Sugeng Priyadi. *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2012). Hal. 62.

1. Ajidarma, Gibran. *Peristiwa 27 Juli*. (Jakarta : Aliansi Jurnalistik Independen Institut Studi Arus Informasi. 1997. Cetakan Kedua)
2. Kasenda, Peter, *Peristiwa 27 Juli 1996 : Titik Balik Perlawanan Rakyat*, (Yogyakarta : 2018, Media Pressindo)

Kondisi buku yang diperoleh milik pribadi masih bagus. Untuk buku yang pertama, tinta nya masih jelas, bukunya masih utuh, tapi sedikit robek di bagian kofer buku, kertas buku berwarna kekuning-kuningan. Jenis sumber tersebut turunan karena tidak ditulisnya tidak sezaman. Buku yang kedua, tintanya masih jelas, buku masih utuh, namun ada halaman yang tidak tercetak. Jenis sumber tersebut turunan karena ditulis tidak sezaman.

Buku yang membahas tentang peristiwa 27 Juli 1996, antara lain:

1. Kaligis, Retor A.W, *Marhaen dan Wong Cilik : Membedah Wacana dan Praktik Nasionalisme Bagi Rakyat Kecil dari PNI sampai PDI-Perjuangan*, (Tangerang Selatan : 2014, CV. Marjin Kiri).

Kondisi buku ini masih utuh dan tidak terlihat cacat, tintanya masih jelas.

Jenis sumber tersebut turunan karena ditulis tidak sezaman.

b. Kritik Intern

Kritik intern dilakukan dengan memperlihatkan dua hal (1) penilaian intrinsik terhadap sumber-sumber (2) membanding-bandingkan kesaksian dari berbagai sumber agar sumber dapat dipercaya (diterikat kredibilitasnya).¹⁷ Ciri-ciri kritik intern adalah : 1.) harus mengetahui sifat sumber tersebut resmi atau tidak

¹⁷ Sugeng Priyadi. *Metode Penelitian...*, Hal. 62.

resmi, 2.) mengidentifikasi pengarang/penulis, 3.) korbokasi atau pendukungan antara sumber yang satu dengan yang lain nya, 4.) komparasi atau perbandingan yaitu membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain nya.

Ketiga media cetak tersebut saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Pada tanggal 29 sampai dengan 31 Juli 1996 ketiga media tersebut sama-sama memberitakan mengenai Peristiwa 27 Juli 1996

Judul buku milik pribadi yang berkaitan dengan peristiwa, antara lain sebagai berikut :

1. Ajidarma, Gibran. *Peristiwa 27 Juli*. (Jakarta : Aliansi Jurnalistik Independen Institut Studi Arus Informasi. 1997. Cetakan Kedua)
2. Kasenda, Peter, *Peristiwa 27 Juli 1996 : Titik Balik Perlawanan Rakyat*, (Yogyakarta : 2018, Media Pressindo)

Kedua buku tersebut didapatkan tidak resmi, karena penulis membelinya di Online Shop. Didalam kedua buku tersebut nama pengarang atau penulisnya tercantum didalam buku-buku tersebut. Tetapi walaupun begitu, kedua buku ini satu sama lain saling mendukung.

1. Kaligis, Retor A.W, *Marhaen dan Wong Cilik : Membedah Wacana dan Praktik Nasionalisme Bagi Rakyat Kecil dari PNI sampai PDI-Perjuangan*, (Tangerang Selatan : 2014, CV. Marjin Kiri).

Kedua buku tersebut didapatkan secara resmi di BAPUSIPDA Provinsi Jawa Barat. Didalam buku tersebut nama pengarang atau penulis nya, serta biografi

penulis buku tersebut. Meski dijadikan sumber sekunder, karena tidak ditulis sezaman tetapi sumber-sumber tersebut bisa dijadikan sebagai sumber sejarah.

3. Interpretasi

Setelah melalui dua tahapan sebelumnya yaitu *heuristik* dan kritik. Tahapan selanjutnya adalah tahapan interpretasi. Tahapan ini adalah proses untuk menganalisis dan menelaah lebih lanjut untuk mencari keterkaitan antar fakta sehingga tersusun rekonstruksi yang baik, lewat fakta tersebut peristiwa ini diolah dengan teori, proses ini kemudian disebut interpretasi atau penafsiran sejarah.

Setiap media cetak memiliki kepentingan masing-masing dalam memberitakan peristiwa 27 Juli 1996. Kepentingan ini terdiri dari 2, yaitu pertama, kepentingan ideologi (Pemikiran) media tersebut, dan kedua, kepentingan pemerintah (Intervensi)

Dalam pemberitaan peristiwa 27 Juli 1996, ketiga koran tersebut memberitakannya berbeda-beda sesuai dengan kepentingan media tersebut. Pada tanggal 29 dan 30 Juli 1996 Kompas menempatkan pemberitaan kerusuhan tersebut menjadi *Top News*. Kompas dalam beritanya selalu memposisikan Megawati sebagai pihak yang teraniaya. Berdasarkan fakta yang ada Kompas terkesan selalu memberikan dukungan-dukungan terhadap Megawati yang terus di “serang” oleh pemerintah. Pikiran Rakyat menjadikan peristiwa 27 Juli 1996 menjadi *Top News* selama 3 hari berturut-turut yaitu pada tanggal 29-31 Juli 1996, Pikiran rakyat dalam menyajikan peristiwa 27 Juli 1996 tidak bisa menyembunyikan kepentingan-kepentingan politiknya. Pers ini terlalu cepat dalam menuduh pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Sementara itu, Republika dalam

memberitakan peristiwa 27 Juli pada tanggal 30 dan 31 Juli 1996 yang menjadi *Top News*, pers yang dilahirkan oleh kalangan muslim, dalam memberitakan peristiwa 27 Juli 1996 terlihat objektif, dengan bahasa yang tidak memberikan provokasi masyarakat, tidak mendukung pihak pemerintah ataupun Megawati

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahapan terakhir dalam metode penelitian. Dari sumber-sumber yang penulis dapatkan serta hasil interpretasi mengenai sumber yang kemudian penulis gabungkan menjadi sebuah tulisan.

Pada tahap penulisan (historiografi) penulis menyajikan laporan hasil penulis dari awal hingga akhir, yang meliputi masalah-masalah yang harus dijawab. Penyajian historiografi meliputi (1) pengantar (2) hasil penelitian dan (3) simpulan.¹⁸ Dalam tahapan yang terakhir ini penulis mencoba mengaitkan fakta, data dan hasil interpretasi yang akan penulis susun untuk menjadi tulisan.

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari: A. Latar Belakang Masalah, B. Rumusan Masalah, C. Tujuan Penuisan, D. Kajian Pustaka, E. Langkah-langkah Penelitian.

BAB II merupakan gambaran umum yang terdiri dari: A. Kondisi Sosial dan Politik Indonesia pada tahun 1990-1996. B. Latar belakang terjadinya Peristiwa 27 Juli 1996. C. Proses terjadinya Peristiwa 27 Juli 1996.

¹⁸ Sugeng Priyadi. *Metode Penelitian...*, Hal. 79.

BAB III merupakan hasil temuan yang terdiri dari: A. Peristiwa 27 Juli 1996 dalam pemberitaan media cetak. B. Analisis Data dan Informasi. C. Dampak adanya Peristiwa 27 Juli 1996. D. Tanggapan para Ulama terhadap peristiwa 27 Juli 1996

BAB IV merupakan bab penutup yang terdiri dari: A. Kesimpulan, B. Saran. Selanjutnya, dalam akhir penulisan dilengkapi dengan daftar sumber dan daftar lampiran.

